

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dengan posisi geografis yang sangat strategis dan berperan dalam penyelesaian konflik yang menjadikan posisi Indonesia semakin penting bagi dunia internasional. Indonesia juga merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dengan segala kekayaan alam dan potensi yang dimiliki, Indonesia menjadi Negara yang penting bagi Negara-negara lain di dunia, baik dari segi ekonomi, politik, pendidikan maupun budaya.¹

Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa dunia yang berkembang pesat pada abad ke 20 ini. Pengajaran bahasa Indonesia kian mengalami peningkatan baik di dalam maupun luar negeri. Dengan perkembangan hubungan Indonesia dengan Negara lain dalam bidang pendidikan, budaya, dan pariwisata, menyebabkan bahasa Indonesia semakin dikenal. Dengan demikian, semakin besar kebutuhan yang dirasakan akan perlunya orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia. Ihwal pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA)² merupakan isu penting bagi perencanaan perkembangan bahasa Indonesia. Pada kongres bahasa Indonesia ke VI tahun 1993 tercatat bahwa pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri seperti Australia, Amerika Serikat, Jerman, Rusia, dan Korea memperlihatkan adanya keberagaman dalam motivasi sosial dan politik sebagaimana tampak dalam keterlibatan pemerintah, lembaga swasta, universitas dalam kerjasama internasional tersebut.³

¹ Ovy Soviati Riva'i. 2010. *Laporan Akhir Pemetaan Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di Asia*, Jakarta: Pusat Bahasa. Hal 14

² BIPA adalah singkatan dari Bahasa Indonesia Penutur Asing. Selanjutnya dalam penelitian ini penyebutannya akan disingkat menjadi BIPA.

³ *Kongres Bahasa Indonesia* melalui <https://taminteknik.wordpress.com/2010/04/27/kongres-bahasa-indonesia/> diakses pada (28/01/2014, 16.41 WIB)

Sejak diikrarkan sebagai bahasa Nasional pada Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, dan ditetapkan sebagai bahasa negara pada Pasal 36 UUD 1945, bahasa Indonesia hingga saat ini telah mengalami perkembangan pesat. Seiring kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia di era global saat ini, peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa juga telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia. Pada 2009, bahasa Indonesia secara resmi ditempatkan sebagai bahasa asing kedua oleh pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam. Kemudian, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri pada 2012, bahasa Indonesia memiliki penutur asli terbesar kelima di dunia, yaitu sebanyak 4.463.950 orang yang tersebar di luar negeri. Bahkan, Ketua DPR RI dalam sidang ASEAN Inter-Parliamentary assembly (AIPA) ke-32 pada 2011 mengusulkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa kerja (*working language*) dalam sidang-sidang AIPA.⁴

Fakta-fakta tersebut mendukung usaha peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang digalang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Program BIPA. BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia mulai dari berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Antusiasme warga negara lain, terutama mahasiswa asing, terhadap bahasa Indonesia sangat tinggi. Hal tersebut diakui Ketua Satgas Program Darmasiswa Republik Indonesia (DRI), Pangesti Wiedarti. Pangesti mengatakan, dalam Program DRI, bahasa Indonesia menjadi jurusan favorit para peserta (survei tahun 2012: 65% bahasa Indonesia; 30% seni-budaya, *culinary and tourism* 3%, lain-lain 2%). Program DRI adalah program beasiswa bagi mahasiswa asing yang negaranya memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, untuk belajar di Indonesia.⁵

Sunjono Dardjowidjojo mengungkapkan bahwa pada awalnya pengajaran bahasa Indonesia hanya ditujukan sebagai alat keterampilan dan ilmu dimana bahasa Indonesia disebutkan sebagai jurusan untuk memperoleh gelar di tingkat

⁴ Kompas. *BIPA Tingkatkan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional* melalui <http://lipsus.kompas.com/kemdikbud/read/2013/10/23/1253102/BIPA.Tingkatkan.Fungsi.Bahasa.Indonesia.Menjadi.Bahasa.Internasional> diakses pada 23 September (16.45 WIB)

perguruan tinggi.⁶ Perkembangan bahasa Indonesia juga telah mampu mengemban fungsinya sebagai sarana komunikasi yang modern dalam pergaulan antar bangsa.⁷ Atas dasar itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menangani masalah kebahasaan di Indonesia merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk membina, mengembangkan, dan sekaligus memfasilitasi lembaga-lembaga tersebut agar masing-masing dapat hidup dan berkembang sesuai dengan karakteristiknya sendiri. Hal itu dimaksudkan agar pengajaran BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri, terus tumbuh dan berkembang sehingga pada akhirnya bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa pergaulan baik dalam hubungan ekonomi, budaya dan sosial antarbangsa.⁸

Seiring dengan kemajuan yang telah dicapai bangsa Indonesia di era global, peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia internasional. Hal itulah yang kemudian menjadi ketertarikan pihak asing untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan, baik ekonom, politik, seni budaya, pendidikan maupun pariwisata.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyadari bahwa Pengajaran BIPA mempunyai peran yang amat penting dan strategis dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional. Hal itu karena Pengajaran BIPA di samping merupakan media untuk menyebarkan bahasa Indonesia sekaligus juga merupakan media untuk menyampaikan berbagai informasi tentang Indonesia, termasuk memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia. Dengan demikian, orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia akan semakin memahami masyarakat dan budaya Indonesia secara lebih komprehensif. Pemahaman itu juga dapat meningkatkan rasa saling pengertian dan saling menghargai sehingga makin meningkatkan pula persahabatan dan kerja sama antarbangsa.

⁶ *Ibid.*

⁷ Adryansyah . 2012. *Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing*, melalui http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/info_bipa diakses pada (26/09/2015, 22.53 WIB).

⁸ *Ibid.*

Sejalan dengan hal tersebut, dengan makin meningkatnya persahabatan dan kerja sama antarbangsa, pengajaran BIPA dapat pula berperan sebagai penunjang keberhasilan diplomasi Indonesia di dunia internasional. Oleh karena itu, Pengajaran BIPA sebenarnya layak dipandang sebagai bagian dari strategi diplomasi. Strategi diplomasi melalui pengajaran bahasa kepada penutur asing seperti itu sebenarnya juga telah diterapkan pula oleh beberapa negara lain, seperti Prancis, Inggris, Jerman, dan Jepang.⁹

Karena sifatnya yang melibatkan penutur asing, bukan orang Indonesia asli, maka pengajaran BIPA saat ini banyak terdapat di luar Indonesia. Minat penutur asing untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya orang asing baik dari Negara tetangga seperti Australia maupun Negara lain di Asia, Amerika dan Eropa yang ingin belajar bahasa Indonesia dengan berbagai motif tujuan.¹⁰ Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Satgas Program Darmasiswa Republik Indonesia, Pangesti Weidarti, bahasa Indonesia semakin dianggap penting dan digemari oleh banyak pihak asing.¹¹

Saat ini bahasa Indonesia telah dipelajari di 35 negara di dunia, antara lain di Australia, Amerika, Jepang, Korea, Singapura, dan Negara-negara kawasan Eropa Barat.¹² Orang yang berminat untuk belajar bahasa Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat. Ada berbagai tujuan dan kepentingan yang melatarbelakangi banyak orang asing mempelajari bahasa Indonesia. Sebagian mereka mempelajari bahasa Indonesia dilatarbelakangi oleh tujuan dan kepentingan untuk pengkajian tentang Indonesia, untuk memperoleh kesempatan sekaligus kelancaran bekerja di Indonesia, untuk kelancaran perjalanan wisata, dan termasuk dalam rangka kerjasama pada bidang tertentu.

⁹ Kemdikbud. 2012. *Profil Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing*, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

¹⁰ Universitas Muhammadiyah Malang. 2012. *Penawaran Beasiswa Darmasiswa RI di UMM Periode 2012-2013* melalui <http://dp2m.umm.ac.id/en/infobeasiswa-penawaran-beasiswa-darmasiswa-ri-di-umm-periode-2012-2013-12020184343-detail.html> diakses pada (28/01/2015, 17.11 WIB)

¹¹ Kompas. 2013. *BIPA tingkatkan Fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional*, melalui <http://edukasi.kompas.com/read/2013/10/23/1253102/BIPA.Tingkatkan.Fungsi.Bahasa.Indonesia.Menjadi.Bahasa.Internasional> diakses pada (01/09/2015, 18.34 WIB)

¹² Efrizal Gani. 2000. *Pemberdayaan Pembelajaran BIPA*, Bandung: Andira. Hal 58

Di lain pihak, keadaan ini tidak terlepas dari keberadaan Indonesia dalam kancan kehidupan dunia internasional.¹³ Negara-negara lain merasa berkepentingan untuk menjalin hubungan ekonomi dan politik serta kerjasama dalam banyak hal dengan Indonesia. Salah satu faktor penunjang tercapainya hubungan dan kerjasama tersebut adalah dengan penguasaan bahasa Indonesia. Dengan demikian, mereka berusaha untuk dapat menguasai bahasa Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program BIPA dilihat dari perspektif diplomasi publik Indonesia?”**

1.3 Tujuan Riset

Adapun yang menjadi tujuan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hasil temuan baru dari penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini adalah melihat sisi kebaruan dari BIPA sebagai diplomasi publik Indonesia agar biasa dijadikan salah satu acuan penelitian.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan program BIPA dilihat dari perspektif diplomasi publik Indonesia.
- c. Untuk dapat memperlihatkan dan mengkorelasi kerangka konseptual yang dipakai dengan masalah yang diteliti.

¹³ Suhardi. 2000. *Pembelajaran BIPA Melalui Kegiatan Wisata*, Bandung: Andira. Hal 134

1.4 Kontribusi Riset

Adapun kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan mengenai pengetahuan diplomasi publik bagi para mahasiswa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam mengkaji berbagai bentuk diplomasi publik dari konseptual.
- b. Secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi mahasiswa terhadap praktek diplomasi publik dalam kehidupan sehari-hari.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sejauh ini, telah terdapat beberapa penelitian dan publikasi yang membahas mengenai diplomasi publik. Beberapa penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, dengan tujuan tidak hanya untuk meneruskan penelitian yang sudah ada, namun juga mengembangkan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Sejauh pengamatan peneliti, masih sangat sedikit penelitian yang fokus pada diplomasi publik Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan diplomasi publik yang dilakukan Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hal itu dimaksudkan agar mengetahui posisi dan letak perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Kajian pustaka yang pertama dalam penulisan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Arif Budi Wuriyanto, dosen Universitas Muhammadiyah Malang dalam penelitian yang berjudul pendekatan silang budaya sebagai pencitraan budaya Indonesia melalui pengajaran BIPA.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pendekatan silang budaya merupakan pencitraan budaya Indonesia dalam upaya membangun citra diri yang didasarkan pada sesuatu yang dimilikinya dibandingkan dengan berdasar

kesejatiidirian. Jika sikap tersebut menjadi mentalitas dalam kalangan *trend setter* dalam masyarakat Indonesia dapat digambarkan dampak selanjutnya secara sosial. Melalui pendekatan silang budaya, bahasa Indonesia dapat dijadikan bahasa pada tataran formal sampai ke tataran substansial. Konsep tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan pencitraan melalui program pengajaran BIPA.¹⁴ Bahasa Indonesia juga disebutkan sebagai bahasa Asia yang berpotensi untuk kebutuhan pertukaran informasi dunia.

Penelitian kedua adalah tulisan Soegihartono yang berjudul Pembakuan Pembelajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing Sebagai Sarana Pengenalan Budaya Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengajaran BIPA merupakan sarana informasi kepada masyarakat internasional untuk memahami keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Konten pengajaran BIPA mengandung informasi sebagai proses komunikasi Indonesia akan keragaman budaya yang dimiliki. Hal itu terjadi karena bahasa Indonesia selalu berkaitan dengan budaya, karena bahasa sebagai sebuah sistem komunikasi yang merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri¹⁵. Pengajaran BIPA tidak hanya berfungsi agar pihak asing memahami bahasa Indonesia, tetapi juga sebagai proses komunikasi dan pemberian informasi mengenai budaya dari masyarakat Indonesia kepada setiap mahasiswa penutur asing. Mengingat bahwa pengajaran BIPA tidak akan optimal apabila tidak melibatkan aspek sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Manfaat dari tulisan kedua ini menunjukkan bahwa pengajaran BIPA tidak hanya sebatas untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada pihak asing, tetapi juga sebagai suatu proses komunikasi mengenai budaya Indonesia kepada setiap mahasiswa penutur asing.

Penelitian ketiga adalah disertasi berjudul *public diplomacy in ASEAN and the cases of Vietnam and Singapore* yang ditulis oleh Anh Dung Bui. Penelitian ini menjelaskan diplomasi publik yang dilakukan ASEAN sebagai sebuah organisasi multilateral yang mengkomparasi aktivitas dalam diplomasi

¹⁴ Arif Budi Wuriyanto. *Pendekatan Silang Budaya Sebagai Pencitraan Budaya Indonesia Melalui Pengajaran BIPA*, Denpasar: Kibbipa. Hal 4

¹⁵ Soegihartono. 2012. *Pembakuan Pembelajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing Sebagai Sarana Pengenalan Budaya Indonesia*, Univesritas Dian Nuswantoro Semarang.

publik yang dilakukan oleh Vietnam dan Singapura. Dalam penelitian ini, penulis fokus karakteristik dari diplomasi publik ASEAN dan perbedaan instrumen diplomasi publik yang dilakukan Vietnam dan Singapura dalam tiga dimensi. Dimensi pertama yang digunakan dalam aktivitas diplomasi publik adalah mengkomunikasikan tujuan dan norma ASEAN. Kedua, menggunakan media untuk dialog dan pertukaran dengan menggunakan *multitrack diplomacy* demi tercapainya hubungan yang lebih baik antar ASEAN maupun internasional. Ketiga, mengadakan program yaitu bekerjasama dengan para stakeholder.¹⁶ Ketiga instrumen tersebut digunakan untuk meningkatkan *bargaining position* ASEAN baik di lingkup Negara anggota maupun di mata internasional.

Manfaat dari tulisan dalam Disertasi Anh Dung Bui dalam penelitian ini adalah untuk melihat dimensi-dimensi yang digunakan oleh diplomasi publik ASEAN apakah juga dipakai dalam diplomasi publik dalam tulisan ini. Selain melihat instrumen dalam aktivitas diplomasi publiknya, peneliti juga melihat relevansi instrumen yang digunakan oleh Vietnam dan Singapura dengan BIPA sebagai instrumen diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia.

Penelitian keempat yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah tesis penelitian berjudul *Korean pop music* sebagai diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia yang ditulis oleh Patria Nurhari. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kehadiran K-pop menjadi fenomena di tingkat global. Melalui K-pop, Korea bisa masuk ke masyarakat Indonesia yang terkenal majemuk. Hal ini disebabkan karena Indonesia sangat adaptif terhadap perkembangan budaya asing yang masuk di tataran domestik. K-pop kemudian bisa digunakan untuk perpanjangan agenda kepentingan nasional bagi Korea Selatan, terutama di bidang ekonomi. Meningkatnya tingkat adaptif masyarakat Indonesia terhadap K-pop menjadi jembatan bagi pertumbuhan konsumsi produk-produk non budaya Korea Selatan.¹⁷

¹⁶ Anh Dung Bui. 2011. *Public Diplomacy ASEAN and the Cases of Vietnam and Singapore*, Sebuah Disertasi. University of Leeds: Institute of Communication Studies.

¹⁷ Patria Nurhari. 2013. *Korean Pop Music Sebagai Diplomasi Publik Korea Selatan di Indonesia*, Sebuah Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

K-pop memiliki peran penting dalam hal ini adalah dengan mengambil peran sebagai Duta Wisata, *fashion*, hingga kerja sama dalam bidang militer. Dukungan dari Indonesia terhadap K-pop merupakan hal yang diperlukan dalam konstelasi hubungan antar Negara. Instrumen K-pop menunjukkan keberhasilan diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan. Manfaat dari penelitian ini adalah melihat instrumen yang digunakan dalam melakukan aktivitas diplomasi publik Korea Selatan. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk menjelaskan diplomasi publik Indonesia adalah dengan program BIPA yang lebih condong kepada pemanfaatan media, pendidikan, serta budaya.

Tulisan kelima adalah Tesis Reza Prima Yanti yang berjudul Diplomasi Publik Korea Selatan di Kawasan Asia Timur; Pemanfaatan Hallyu Sebagai Sumber *Soft Power*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Hallyu sangat berpotensi bagi diplomasi publik Korea di kawasan Asia Timur. Hal itu disebabkan karena budaya Korea memiliki persamaan dan kecocokan dengan budaya di kawasan Asia Timur. Diplomasi publik yang dilakukan adalah dengan penyebaran produk-produk Korea melalui media visual, khususnya drama televisi. Proses pelaksanaan aktivitas diplomasi publik Korea adalah dengan pendekatan langsung (*people to people*) pada masyarakat di kawasan Asia Timur.¹⁸ Pemerintah Korea bertujuan untuk mempromosikan Korea Selatan dan meningkatkan citra nasional Korea Selatan melalui diplomasi publik yang dilakukan. Selain itu, Korea Selatan juga membentuk institusi-institusi publik luar negeri yang bertugas untuk meningkatkan citra positif Korea Selatan. Reza Prima Yanti melihat bahwa hallyu memberikan implikasi bagi peningkatan *soft power* Korea Selatan di kawasan Asia Timur. Hal itu dapat diamati dari peningkatan hubungan sosiokultural dan ekonomi antara Korea Selatan dengan Negara di kawasan Asia Timur.

Rujukan keenam dalam proses penelitian ini adalah dengan mengacu pada tulisan Dina Puspita berjudul peran diplomasi publik dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat pada masa pemerintahan SBY. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa diplomasi publik yang dilakukan Indonesia

¹⁸ Reza Prima Yanti, 2010. *Diplomasi Publik Korea Selatan di Kawasan Asia Timur; Pemanfaatan Hallyu Sebagai Sumber Soft Power*, Sebuah Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

bertujuan untuk menciptakan citra positif bagi Indonesia yang kemudian dapat dimanfaatkan agar masyarakat internasional memiliki persepsi baik tentang Indonesia dan dapat membangun *mutual understanding*, serta dapat mempengaruhi pola pikir, tindakan, dan kebijakan Amerika.¹⁹ Citra yang ditunjukkan oleh Indonesia adalah dengan diplomasi publik yang mengarah pada membangun opini bahwa Indonesia adalah Negara dengan budaya yang moderat, demokratis dan aman. Kekayaan dan keunikan Indonesia menjadi nilai tawar tersendiri bagi publik internasional.

Contoh dari diplomasi yang dilakukan adalah dengan identitas Batik is Indonesia, dimana Indonesia berhasil memperkenalkan batik sebagai salah satu kekayaan Indonesia kepada Amerika. Hal itu kemudian membentuk asimilasi budaya dengan terselenggaranya even American Batik. Seluruh aktivitas diplomasi publik dengan tujuan menumbuhkan citra tersebut dilakukan agar Amerika mendukung Indonesia dalam segala aspek kepentingan luar negerinya pada konstelasi politik internasional. Diplomasi publik yang dilakukan Indonesia diimplementasikan melalui instrumen budaya, pendidikan, official visit dan media sosial.

Penelitian pertama menjelaskan bagaimana silang budaya antara Indonesia dan asing bisa berpotensi sebagai media membangun citra di dunia internasional. Selain itu, di penelitian pertama disebutkan bahwa Bahasa Indonesia juga disebutkan sebagai bahasa Asia yang berpotensi untuk kebutuhan pertukaran informasi dunia. Fokus penelitiannya adalah pada proses silang budaya dan pengaruhnya terhadap pencitraan Indonesia. Tulisan kedua memperlihatkan bahwa BIPA selain sebagai pengajaran bahasa Indonesia, juga digunakan sebagai proses penyebaran informasi mengenai budaya Indonesia kepada penutur asing. Tulisan ketiga fokus pada tiga instrumen diplomasi publik serta komparasi antara Vietnam dan Singapura. Dengan tiga instrumen yang disebutkan didalamnya, aktivitas diplomasi publik dapat berjalan dengan baik. Tulisan ini menyoroti dalam hal melakukan diplomasi publiknya lebih banyak menggunakan budaya. Penelitian keempat fokus pada K-pop sebagai instrumen yang digunakan untuk

¹⁹ Dina Puspita. 2014. *Peran Diplomasi Publik dalam Memperkuat Hubungan Bilateral Indonesia Amerika Serikat Pemerintahan SBY (2004-2014)*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

melakukan diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia. Sementara tulisan kelima lebih luas dari penelitian ketiga, disebutkan bahwa hallyu bisa menjadi alat untuk perpanjangan kepentingan nasional dalam proses diplomasi publik di kawasan Asia Timur yang dalam prakteknya terjadi kontak langsung *people to people*. Dengan pendekatan *soft power*, penelitian keempat menjelaskan hallyu memiliki implikasi bagi peningkatan citra Korea Selatan di Asia Timur. Di sisi lain, penelitian keenam menjelaskan empat instrumen yang menjadikan diplomasi publik Indonesia pada masa SBY menjadi berhasil.

Persamaan penelitian ini dengan beberapa acuan yang telah peneliti sampaikan adalah pada semuanya membahas mengenai diplomasi publik dan peningkatan citra Negara sebagai tujuan dari proses yang dilaksanakan. Hal yang membedakan tulisan ini dengan yang sebelumnya adalah dalam instrumen yang digunakan dan aktor yang melakukan aktivitas diplomasi. Instrumen yang digunakan adalah program beasiswa BIPA, dimana dalam aktivitas diplomasi publik didalamnya hanya menggunakan tiga instrumen saja, yakni pendidikan, budaya, serta media massa. Serta, aktor yang menjalankan aktivitas diplomasi adalah lembaga pendidikan perguruan tinggi, kelompok, serta aktor individu. Secara umum memang masih memiliki persamaan antara tulisan yang satu dengan yang lainnya. Namun, dalam penelitian ini lebih condong seperti acuan tulisan yang pertama, kedua, dan keenam yaitu tulisan Arid Budi Wuriyanto, Soegihartono, dan Dina Puspita. Hanya saja pada tulisan ini tidak terdapat program visit untuk menjelaskan peran BIPA sebagai instrumen diplomasi publik yang dilakukan. Selain menunjukkan bahwa BIPA berpengaruh terhadap citra Indonesia di mata internasional, tulisan ini juga menunjukkan mengenai keberhasilan, faktor pendukung, serta penghambat pelaksanaan program BIPA. Jika tulisan pertama dan kedua hanya melihat dari sudut pandang pengajaran, tulisan ini menjelaskan bagaimana budaya dan media massa berperan dalam proses diplomasi publik melalui pelaksanaan BIPA.

Tabel I.I *Literature Review*

Nama	Judul	Hasil
Arif Budi Wuriyanto	Pendekatan silang budaya sebagai pencitraan budaya Indonesia melalui pengajaran BIPA (Jurnal)	Melalui pendekatan silang budaya, bahasa Indonesia dapat dijadikan bahasa pada tataran formal sampai ke tataran substansial. Konsep tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan pencitraan melalui program pengajaran BIPA. Bahasa Indonesia juga disebutkan sebagai bahasa Asia yang berpotensi untuk kebutuhan pertukaran informasi dunia.
Sugiehartono	Pembakuan Pembelajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing Sebagai Sarana Pengenalan Budaya Indonesia (Jurnal)	Pengajaran BIPA merupakan sarana informasi kepada masyarakat internasional untuk memahami keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Konten pengajaran BIPA mengandung informasi sebagai proses komunikasi Indonesia akan keragaman budaya yang dimiliki. Hal itu terjadi karena bahasa Indonesia selalu berkaitan dengan budaya, karena bahasa sebagai sebuah sistem komunikasi yang merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri. Pengajaran BIPA tidak hanya berfungsi agar pihak asing memahami bahasa Indonesia, tetapi juga sebagai proses komunikasi dan pemberian informasi mengenai budaya dari masyarakat Indonesia kepada setiap mahasiswa penutur asing. Mengingat bahwa pengajaran BIPA tidak akan optimal apabila tidak melibatkan aspek sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat.
Anh Dung Bui	Public Diplomacy in ASEAN and the Cases of Vietnam and Singapore (Disertasi)	Diplomasi publik yang dilakukan ASEAN sebagai sebuah organisasi multilateral yang mengkomparasi aktivitas dalam diplomasi publik yang dilakukan oleh Vietnam dan Singapura. Penulis fokus karakteristik dari diplomasi publik ASEAN dan perbedaan instrumen dipomasi publik yang dilakukan Vietnam dan Singapura dalam tiga dimensi.
Patria Nurhari	Korean pop music sebagai diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia (Tesis)	Melalui K-pop, Korea bisa masuk ke masyarakat Indonesia yang terkenal majemuk. Hal ini disebabkan karena Indonesia sangat adaptif terhadap perkembangan budaya asing yang masuk di

		tataran domestik. K-pop kemudian bisa digunakan untuk perpanjangan agenda kepentingan nasional bagi Korea Selatan, terutama di bidang ekonomi. Meningkatnya tingkat adaptif masyarakat Indonesia terhadap K-pop menjadi jembatan bagi pertumbuhan konsumsi produk-produk non budaya Korea Selatan.
Reza Prima Yanti	Diplomasi Publik Korea Selatan di Kawasan Asia Timur; Pemanfaatan Hallyu Sebagai Sumber Soft Power (Tesis)	Hallyu sangat berpotensi bagi diplomasi publik Korea di kawasan Asia Timur. Hal itu disebabkan karena budaya Korea memiliki persamaan dan kecocokan dengan budaya di kawasan Asia Timur. Diplomasi publik yang dilakukan adalah dengan penyebaran produk-produk Korea melalui media visual, khususnya drama televisi. Proses pelaksanaan aktivitas diplomasi publik Korea adalah dengan pendekatan langsung (<i>people to people</i>) pada masyarakat di kawasan Asia Timur.
Dina Puspita	Peran Diplomasi Publik dalam Memperkuat Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan SBY. (Tesis)	Diplomasi publik yang dilakukan Indonesia bertujuan untuk menciptakan citra positif bagi Indonesia yang kemudian dapat dimanfaatkan agar masyarakat internasional memiliki persepsi baik tentang Indonesia dan dapat membangun mutual understanding, serta dapat mempengaruhi pola pikir, tindakan, dan kebijakan Amerika. Citra yang ditunjukkan oleh Indonesia adalah dengan diplomasi publik yang mengarah pada membangun opini bahwa Indonesia adalah Negara dengan budaya yang moderat, demokratis dan aman.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Diplomasi Publik

Diplomasi merupakan proses negosiasi untuk menghindari maupun mengelola konflik antar Negara. Dalam melakukan proses diplomasi, para aktor harus mampu menilai tujuan dan potensial dan mengukur hal tersebut dengan mempertimbangkan kekuatan. Diplomasi yang berhasil sering mengaitkan kerjasama di salah satu bidang yang dianggap penting.²⁰ Diplomasi publik adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan publik mancanegara.²¹ Tujuannya meliputi dua hal, pertama mempengaruhi perilaku dari aktor Negara yang bersangkutan dan memfasilitasinya.

Oleh sebab itu, *soft power* menjadi perangkat penting dalam melaksanakan aktivitas diplomasi publik. Diplomasi publik juga bertujuan untuk memberikan pemahaman atas Negara, sikap, institusi, dan budaya serta kebijakan yang dijalankan oleh suatu Negara. Jan Mellisen mendefinisikan diplomasi publik sebagai usaha untuk mempengaruhi orang lain di luar batas Negara dengan cara yang positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu Negara.²² Diplomasi publik juga berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, menginformasikan, dan mempengaruhi perilaku publik.

Evan Potter menjelaskan bahwa proses diplomasi publik tidak hanya terjadi di luar negeri tetapi juga di dalam negeri. Sebagai instrumen *soft power*, perkembangan diplomasi publik tergolong pesat, hal ini karena banyaknya kenyataan yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam diplomasi jalur pertama dianggap telah gagal mengatasi konflik antar Negara. Diplomasi publik memiliki ciri sebagai suatu proses negosiasi yang dilakukan

²⁰ Richard Mansbach. 2008. *Introduction to Global Politics*, London and New York: Routledge. Hal. 433-435

²¹ Jusuf Badri. 1994. *Kiat Diplomasi: Mekanisme dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal 22

²² Citra Hennida. *Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri*, FISIP Universitas Airlangga. Hal 2

tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga kelompok. Bentuknya yang informal dipandang efektif dalam menurunkan tensi ketegangan, menghilangkan ketakutan, dan ketergantungan antar berbagai pihak.²³

Diplomasi publik harus membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan pemerintah, memberikan masukan melalui informasi penting, dan memberikan cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Untuk itu, diperlukan kerjasama aktor Negara dan aktor non Negara yang ditunjukkan untuk meningkatkan nilai tawar.²⁴ Aktor non Negara ini misalnya dapat berinteraksi untuk mempengaruhi, memberikan masukan dan menerapkan kebijakan luar negeri. Penerapan diplomasi publik tidak terlepas dari pengkomunikasian kebijakan luar negeri terhadap publik mancanegara.²⁵ Ciri utama dalam diplomasi publik adalah melibatkan semua *stakeholder* dalam prosesnya. *Stakeholder* disini tidak hanya Departemen Luar Negeri, tetapi juga lintas departemen dalam pemerintah, swasta, NGO, media, dan individu. Dengan porsi keterlibatan yang beragam dan besar tersebut, maka rancangan strategi komunikasi harus diperhatikan.

J.B Manheim menyebutkan diplomasi publik sebagai berikut:

“Efforts by the government of one nation to influence public or elite opinion in a second nation for the purpose of turning foreign policy of the target nation to advantage”²⁶

Menurutnya diplomasi publik adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah di dalam wilayah suatu negara untuk mempengaruhi opini publik ataupun elit negara dengan tujuan menjadikan Kebijakan Luar Negeri negara tersebut menjadi sebuah keuntungan.²⁷

²³ Philip Fiske. 2005. *European Infopolitik, Developing EU Public Diplomacy Strategy*, London: The Foreign Policy Centre. Hal 10

²⁴ Bernard Simonin. 2008. *Nation Branding and Public Diplomacy: Challenges and Opportunities*, University of Michigan: Hotnews.ro. Hal. 6

²⁵ Mark Leonard. 2002. *Public Diplomacy*, London: The Foreign Policy Centre. Hal 9

²⁶ David Paletz. 1994. *“The Media, Public Opinion, and U.S.Foreign Policy in The Gulf War*, Chicago: The University of Chicago Press. Hal 132

²⁷ S.L Roy. 1991. *Diplomasi*, Jakarta: Rajawali. Hal 5 yang diterjemahkan dari buku asli yang berjudul *diplomacy* oleh Herwanto dan Mirsawati.

Definisi lain mengenai diplomasi publik dikemukakan oleh H.Tuch di mana ia mendefinisikan diplomasi publik:

“A Government’s process of communicating with foreign publics in an attempt to bring about understanding for its nation’s ideas and ideals, its institutions and culture, as well as its national goals and current policies.”²⁸

Menurutnya, diplomasi publik merupakan suatu proses dari pemerintahan dalam bentuk komunikasi dengan publik luar negeri dan mengusahakan adanya pengertian mengenai ide dan idealnya negara, institusi-institusi dan kebudayaannya, begitu pula dengan tujuan nasional dan kebijakan negara tersebut. Kekurangan yang disampaikan baik oleh J.B. Manheim maupun oleh H.Tuch mengenai diplomasi publik adalah kedua tokoh tersebut tidak menyatakan secara eksplisit bahwa diplomasi publik juga bertujuan bagi publik dalam negeri di mana berguna untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai pertanggung jawaban pemerintah tentang kebijakan atau sikap yang diambilnya mengenai suatu isu internasional tertentu.

Selain itu, diplomasi publik juga berguna untuk menggalang dukungan publik dalam negeri yang diperlukan ketika pemerintah memiliki kepentingan tertentu yang memiliki kaitan dengan identitas atau image negaranya ke dunia internasional²⁹. Seiring berjalannya waktu, diplomasi publik pun tidak hanya dilakukan oleh pemerintah resmi suatu Negara, tapi dapat juga dilakukan oleh aktor non-negara dalam rangka kepentingan tersebut.

Berdasarkan kerangka konsep yang digunakan, Diplomasi publik didefinisikan sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui *understanding, informing, and influencing foreign audiences*. Jika proses diplomasi tradisional dikembangkan melalui mekanisme *government to government relations*, maka diplomasi publik lebih ditekankan pada *government*

²⁸ Wang Jay. 2006. *Public Diplomacy and Global Business*, dalam *Journal of Business Strategy*, Vol.27, No.3

²⁹ Christopher Ross. 2002. *Public Diplomacy Comes Age*, Washington: Center for Strategic and International Studies and The Massachusetts Institute of Technology. Hal 76-77

to people atau bahkan *people to people relations*.³⁰ Diplomasi publik bertujuan untuk mencari teman di kalangan masyarakat negara lain, yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya membangun hubungan baik dengan negara lain.

Diplomasi publik menekankan cara-cara berkomunikasi dengan publik Negara lain. Sarana yang dapat digunakan dalam diplomasi publik adalah kegiatan kebudayaan, pertukaran mahasiswa, pemutaran film, pertunjukan teater dan sebagainya. Hal itu bertujuan untuk membangun citra positif terhadap gambaran kehidupan dan dinamika politik suatu Negara. Gambaran positif ini sangat penting untuk meningkatkan kerjasama antar Negara, sehingga tercipta kepercayaan bahwa suatu bangsa memiliki potensi untuk pengembangan kerjasama dalam bidang politik, pendidikan, maupun budaya.³¹

Diplomasi publik pada dasarnya meliputi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah maupun aktor non Negara dalam berkontribusi pada pemeliharaan dan promosi *soft power*. *Soft power* tersebut dibentuk melalui aktivitas para aktor yang berpengaruh pada publik, baik para seniman, pakar politik, LSM, kelompok media, akademisi, universitas, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Joseph Nye bahwa *soft power* suatu Negara bersumber dari tiga hal, budaya, nilai politik, dan politik luar negeri.³² Kemudian ketiga sumber dari *soft power* tersebut diimplementasikan dalam diplomasi publik melalui aktor baik Negara maupun aktor non Negara.

Strategi diplomasi publik tidak hanya menempatkan Negara pada program pengembangan citra yang positif secara domestik saja, tetapi juga internasional. Interaksi antar berbagai aktor di dalam negeri juga berperan penting untuk meningkatkan *soft power*. Hal ini memungkinkan terjadinya berbagai kegiatan yang mendukung keberhasilan aktivitas diplomasi publik. Diplomasi publik menekankan pada hegemoni melalui informasi, kebudayaan, dan pendidikan. Proses pembentukan citra dan persepsi menjadi hal yang penting karena winning

³⁰ Definisi umum tentang Diplomasi Publik yang dikeluarkan oleh Pusat Publik Diplomasi di University of Southern California pada tahun 2005.

³¹ *Op.Cit.*

³² Dina Puspita *Op.Cit* Hal. 17

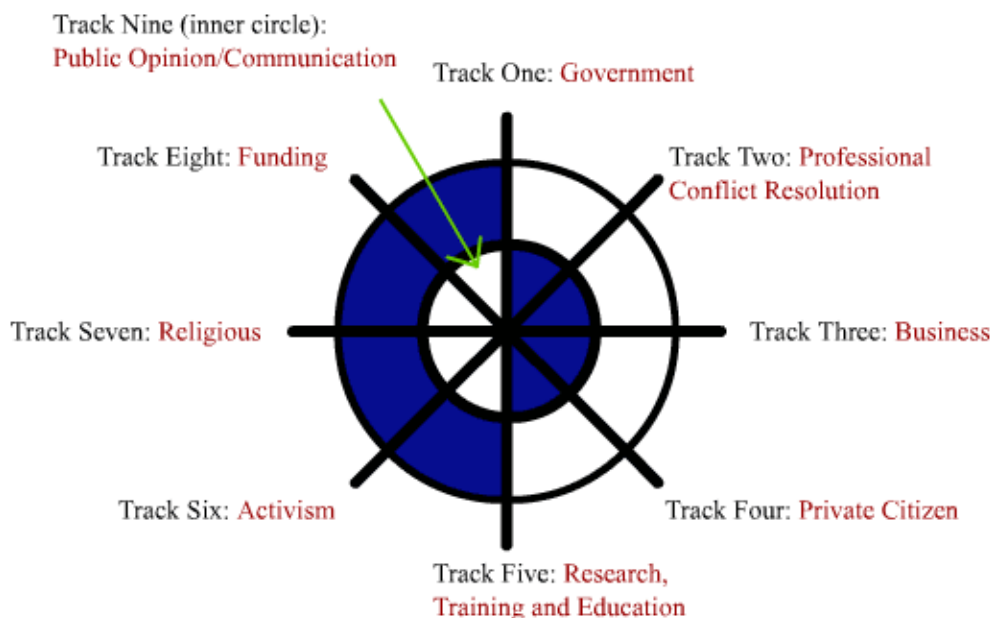
hearts and minds menjadi esensi dari keberhasilan diplomasi publik demi pencapaian kepentingan nasional yang lebih luas.

Dalam konteks penelitian ini, konsep diplomasi publik digunakan untuk menjelaskan aktivitas diplomasi publik melalui pelaksanaan program BIPA dengan menggunakan instrumen pendidikan, budaya, serta media sosial. Instrumen yang digunakan tidak memiliki batasan yang pasti karena perkembangan dunia sosial, media dan teknologi informasi yang sangat pesat. Melalui pelaksanaan program BIPA dan segenap aktivitas interaksi yang terjadi antara pengelola, kelompok, dan individu dengan para mahasiswa program BIPA. Program BIPA menjadi salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk bisa berkomunikasi dengan dunia internasional mengenai citra Indonesia. Tujuannya adalah untuk menghadirkan anggapan baik dari dunia internasional khususnya Negara yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Program BIPA dilirik sebagai salah satu instrumen yang mampu memberikan pemahaman mengenai Negara, sikap, institusi, serta ragam budaya yang ada di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk melahirkan pemahaman, menginformasikan mengenai Indonesia di luar demi mempengaruhi perilaku publik. Bentuk dari diplomasi publik melalui pelaksanaan program BIPA adalah dalam bentuk informal melalui pengenalan budaya dimana terjadi antara kelompok dengan para mahasiswa asing yang mengikuti program, interaksi antara individu satu dengan yang lain dalam hal mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Diplomasi publik disini membutuhkan kerjasama antara beberapa aktor agar tujuan dari kegiatan diplomasi dapat tercapai. Dalam tulisan ini kerjasama yang terjadi adalah antara pusat, universitas, dosen, komunitas belajar, serta dengan individu yang berinteraksi langsung dengan para mahasiswa BIPA. Semua kegiatan itu dimaksudkan agar Diplomasi publik dapat berjalan sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui *understanding, informing, and influencing foreign audiences*.

1.6.2 Multi-Track Diplomacy

Dalam upaya melakukan diplomasi publik, diperlukan kerjasama antar aktor pemerintah dan aktor non pemerintah yang melibatkan metode diplomasi multi jalur atau biasa dikenal dengan *multi track diplomacy*. Diplomasi ini memiliki relevansi dengan diplomasi publik karena terdapat peran yang signifikan dari pemerintah, swasta hingga media dalam menjalankan diplomasi demi tercapainya kepentingan nasional, dalam hal ini adalah Indonesia terhadap dunia internasional melalui pelaksanaan program BIPA. Relevansinya dengan diplomasi publik juga terlihat bahwa proses diplomasi tidak akan menjadi efektif jika hanya dibebankan pada pemerintah saja sebagai aktor dalam melakukan diplomasi. Sejalan dengan tujuan diplomasi publik yang mengutamakan *government to people* dan *people to people contact*, maka pemerintah, swasta dan media dapat berperan aktif dan bekerjasama dalam aktivitas diplomasi publik.³³ Dibawah ini, diagram disajikan multi track diplomacy untuk membantu dalam memahami kesembilan jalur diplomasi multi jalur.



Sumber: www.beyondintracktability.org

³³ Diamond Louise and John Donald. 1996. *Multitrack Diplomacy: A System Approach to Peace*, Third Edition. University of Michigan: Kumarian Press. Hal. 20

Meskipun kesembilan jalur tersebut sangat mungkin untuk digunakan dalam praktek diplomasi publik, namun yang menjadi poin utama dalam diplomasi publik dalam penelitian ini adalah peran pemerintah, non pemerintah, masyarakat, peneliti dan pendidikan, agama, para aktivis, serta media dalam membentuk opini publik. Aktor pemerintah memiliki andil yang besar dalam hal ini melakukan pengawasan dalam praktek diplomasi publik melalui BIPA. Aktor selain pemerintah, dapat mengambil peran yang cukup signifikan dalam proses implementasi diplomasi publik, baik sebagai think tank groups atau pun sebagai eksekutor dalam proses diplomasi. Dalam perkembangannya, track two dalam lingkaran diplomasi multi jalur itu sendiri dipengaruhi oleh bahasa yang berkaitan dengan standarisasi dan terms yang digunakan untuk menjelaskan bahasa tersebut dapat menunjang atau menghambat berhasilnya suatu proses diplomasi. Track two dalam hal ini berhubungan erat dengan track keempat yakni Warga Negara, dimana perwujudan aktivitas diplomasinya dilihat berdasarkan keterlibatan personal.³⁴ Keterlibatan hubungan individu dengan *private citizen* yang berhubungan dengan bahasa juga memiliki pengaruh dari berbagai budaya yang berbeda yang menyebabkan keterkejutan budaya (*culture shock*) karena didalamnya mencakup diplomasi yang dilakukan oleh personal dalam usahanya menunjang berhasilnya kegiatan diplomasi.

Masyarakat dan aktivis dalam hal ini mampu berkolaborasi dan berinteraksi langsung dengan para mahasiswa BIPA dalam melakukan proses diplomasi, baik dari segi memberikan pemahaman budaya atau penggalian informasi yang berhubungan dengan pendidikan dan praktek bahasa Indonesia. Peneliti dan agama secara langsung terlibat karena proses diplomasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan instrumen pendidikan di lingkungan universitas. Dukungan media dalam hubungan multilateral Indonesia dan dunia internasional dapat berjalan karena media memberikan pengaruh serta memberikan konstuksi sosial terhadap masyarakat internasional. Media massa melalui program BIPA menjadi alat yang efektif dalam mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku publik. Oleh karena itu, pembentukan opini publik baik

³⁴ Louise and Mc.Donald, 1996. *Multi-track diplomacy: A system Approach to Peace-3rd ed.* New York: Kumarian Press.

domestik maupun internasional dapat dilakukan dengan memanfaatkan media massa.

1.7 Hipotesa/ Argumen Penelitian

Dari paparan pendahuluan di atas, penulis mengajukan argumen penelitian bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi dan kemajuan media massa, kemajemukan budaya dan bahasa serta besarnya minat para penutur asing untuk mempelajari bahasa Indonesia menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program BIPA. Selain itu, *culture shock*, kontak bahasa antara pelaku program, serta sikap mental masyarakat Indonesia berpotensi menjadi penghambat dalam pelaksanaan program BIPA.

1.8 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Pada dasarnya sebuah penelitian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang ingin diketahui penulis. Penelitian tentang pelaksanaan program BIPA dalam perspektif diplomasi publik Indonesia ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis berusaha untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan keadaan objek serta permasalahan yang ada. Oleh karena itu, metode deskriptif di sini diharapkan dapat mencapai tujuan penelitian, yaitu menggambarkan secara jelas fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Fokus pada penelitian ini adalah menjelaskan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan BIPA sebagai praktek diplomasi publik yang dilakukan Indonesia.

b. Teknik Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan atau verifikasi³⁵. Dalam menganalisa penelitian ini penulis menggunakan pola induksi dengan tiga tahapan yakni :

1. Mengumpulkan data-data tentang fenomena yang diteliti
2. Pengolahan. Pada tahapan ini peneliti mengolah data untuk di pilah-pilah mana yang cocok dan sesuai dengan kategori yang dibutuhkan oleh masing-masing sub bab penelitian.
3. Analisa. Tahapan terakhir ini menjadikan data yang mentah dan sudah diolah tadi, untuk kemudian di analisa dan di interpretasikan oleh peneliti sehingga mempengaruhi proses pembentukan hasil akhir dari riset.

c. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Lokasi penelitian mengambil dua tempat, terdiri dari BIPA Universitas Muhammadiyah Malang dan BIPA Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sementara jangkauan penelitian ini adalah dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Alasan mengambil batas penelitian dari tahun 2012 hingga tahun 2015 adalah karena merujuk kepada data dari Kemdikbud mengenai jumlah penyebaran penutur asing bahasa Indonesia di dunia. Fokus pada penelitian ini adalah pelaksanaan program BIPA sebagai praktek diplomasi publik yang dilakukan Indonesia serta faktor pendukung dan penghambat program tersebut. Selain itu, penulis juga menjelaskan mengenai tinjauan historis yang mendukung untuk kelengkapan data penelitian ini.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah (*research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Literatur ini berupa buku-buku mengenai diplomasi publik baik teori dan praktik, dokumen dan arsip Kantor Urusan Internasional Universitas Ahmad Dahlan dan Kantor BIPA

³⁵ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*, Bandung : Alfabeta. Hal 246

Universitas Muhammadiyah Malang, dokumen dan arsip Kemdikbud seputar keberhasilan pelaksanaan program BIPA dan laporan akuntabilitas kinerja Kemdikbud pada tahun 2014, jurnal mengenai pembelajaran BIPA, surat kabar dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti yang dianggap *reliable* seperti berita seputar BIPA dalam Kompas, Republika, dan portal resmi Kemdikbud.

Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi, oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara dimana Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria yakni dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang dipilih dan dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa key informans, yaitu orang-orang yang berkompeten dari pihak akademisi dan praktisi yang memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam hal ini pihak yang diwawancarai adalah karyawan Kantor Urusan Internasional UAD, Kepala kantor BIPA UMM, Bapak Tonny Dian Effendi sebagai dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UMM dengan konsentrasi dalam bidang diplomasi publik, Ibu Reza Praditya Yuda selaku pemerhati media dari Universitas Diponegoro serta beberapa mahasiswa program BIPA.

Untuk keperluan penelitian ini, maka informan merupakan pelaku yang terlibat secara langsung dan berusaha mengetahui peran BIPA dalam diplomasi publik Indonesia, maupun pihak-pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi secara tidak langsung dalam proses-proses diplomasi publik Indonesia. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengutamakan teknik wawancara melalui *face to face*, dan *via email* lewat internet jika terjadi kendala dan beberapa hambatan. Hal ini dilakukan demi menjaga validitas data yang digunakan dalam penelitian ini.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab, terdiri dari: **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang memuat mengenai pengantar diplomasi publik dan BIPA serta penjelasan mengenai pentingnya topik untuk dijadikan penelitian. Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kontribusi riset, kajian pustaka yang berisi ulasan dan review dari beberapa penelitian mengenai diplomasi publik yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Kerangka teori dan konsep. Metodologi yang menjelaskan mengenai jenis penelitian, teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian. Hipotesa atau argumen penelitian sebagai argumen sementara yang akan dibuktikan keabsahannya dalam penelitian ini.

BAB II: SEJARAH BIPA DAN DIPLOMASI PUBLIK

Berisi mengenai sejarah berdirinya BIPA sebagai bahasa kedua, sejarah pengajaran BIPA di ASIA, mulai dari Jepang, Papua Nugini, China, Korea, Amerika, Rusia, Inggris. Termasuk juga kilas balik mengenai sejarah diplomasi publik. Pada bagian ini dijelaskan pula mengenai visi dan misi program BIPA serta pentingnya diplomasi publik.

BAB III: PELAKSANAAN PROGRAM BIPA

Berisi penjelasan mengenai perkembangan BIPA. Termasuk penjelasan mengenai perguruan tinggi yang menyelenggarakan program BIPA di dunia dan Indonesia, jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun, serta komposisi warga Negara asing yang mengikuti program BIPA.

BAB IV: FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PROGRAM BIPA DALAM PERSPEKTIF DIPLOMASI PUBLIK

Berisi mengenai hasil penelitian yang terdiri dari penjelasan mengenai pencapaian BIPA sebagai instrumen diplomasi Indonesia terhadap dunia

internasional melalui bidang pendidikan program BIPA, proses diplomasi publik, faktor penunjang proses diplomasi publik melalui instrumen pendidikan, budaya, serta media massa termasuk faktor penghambat pelaksanaan program tersebut.

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.